**BAB IV**

**KEBIJAKAN MEDIA, TERORISME DAN STIGMATISASI[[1]](#footnote-2) TERHADAP PELAKU TEROR**

Analisis wacana model Van Dijk mengetengahkan analisa pada tiga tingkatan yaitu level mikro, meso dan makro. Pada level mikro, analisa dilakukan terhadap teks dengan menggunakan perangkat analisa teks yang dikemukakan Van dijk. Analisa tersebut telah penulis sajikan pada bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menyajikan analisa pada level meso yaitu berkaitan dengan kognisi wartawan dalam membuat berita. Pada level makro analisa dikaitkan dengan konteks sosial yang melingkupi terjadinya peristiwa dan munculnya wacana.

Faktor kognisi sosial yang melekat pada kinerja awak media berada di sisi internal proses produksi berita. Wacana yang lahir dari skema redaksional tersebut tidak lepas dari konteks sosial yang melingkupinya. Pada jenjang konteks sosial, analisis mengaitkan penelitian dengan konteks sosial budaya. Dua hal yang diperhatikan dalam konteks sosial, menurut van Dijk adalah kekuasaan *(power)* dan akses *(access)*. Sebagai contoh, apabila suatu teks mendiskreditkan kelompok A dalam kasus terorisme hal ini bisa dimaknai, pertama, disebabkan oleh kognisi wartawan yang membuat berita tersebut cenderung medsikreditkan kelompok A. Kedua, teks tersebut merefleksikan wacana masyarakat yang mendiskreditkan kelompok A[[2]](#footnote-3).

Simbol agama, asal-usul kedaerahan, cacat perilaku dan konsep keyakinan dalam beragama menjadi materi pemberitaan dalam proses stigmatisasi pelaku teror. Teks media lahir dari proses redaksional melibatkan ide, keyakinan, pengalaman, preferensi, afiliasi dan beragam kepentingan dalam skema kerja jurnalis. Faktor kognisi sosial mengetengahkan data yang diperoleh dari rujukan yang dikemukakan oleh pihak pemroduksi, pemerhati, maupun audiens yang dimuat oleh suatu media. Para jurnalis yang terlibat dalam proses produksi berita tidak berdiri pada ruang hampa kepentingan. Kepercayaan, pengetahuan dan prasangka yang dimiliki oleh wartawan akan terlibat dalam proses pembuatan berita. Faktor individual tersebut melebur dalam kebijakan media yang menaunginya sehingga menghasilkan formula tertentu dalam produksi berita. Kebijakan media yang dirumuskan sebagai patokan kerja redaksional tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan individual.

Analisa pada level meso akan mencermati kognisi individu wartawan dalam membuat berita tentang terorisme. Pada level makro wacana terorisme akan mencermati wacana terorisme dalam kaitanya dengan kerja media yang tidak lepas dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, kebijakan media, dan konteks sosial lain yang terkait. Pada bab ini akan diuraikan faktor kognisi sosial yang melingkupi kerja media dalam proses stigmatisasi. Proses tersebut dikaitkan dengan konteks sosial yang melingkupi lahirnya wacana media. Penulis akan menguraikan keterkatian antara agama dan terorisme, kaitan antara media dengan terorisme, fenomena bom bunuh diri dan proses stigmatisasi dalam kerangka kebijakan media.

1. **Agama dan terorisme**

Terorisme dalam berbagai bentuknya memiliki kaitan dengan kepercayaan yang dianut pelakunya. Kepercayaan yang dianut pelaku teror menjadi pemicu keberanian dan justifikasi kebenaran tindakan teror yang mereka lakukan. Studi tentang relasi antara kepercayaan dan terorisme melahirkan sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak dapat disebut sebagai hubungan kausalitas. Penyebab lahirnya terorisme tidak bisa dijelaskan secara terpisah antara kepercayaan dan faktor-faktor lain yang mendukung. Artinya, kepercayaan yang dianut pelaku teror bukan satu-satunya faktor determinan yang melahirkan terorisme.

Keterkaitan antara agama dan terorisme menjadi salah satu topik wacana yang dikembangkan Harian Kompas. Agama menjadi salah satu bagian dari kepercayaan individual yang dianut selain nasionalisme, kesukuan dan sistem kepercayaan lain. Dalam kasus serangan teroris di Indonesia, Islam menjadi agama yang paling banyak dikaitkan dengan aksi terorisme. Judul berita berikut menunjukkan intensi perhatian Kompas dalam membahas keterkaitan Islam dengan terorisme yang marak di Indonesia. Berita Kompas yang membahas keterkaitan tersebut adalah:

*Terorisme dan respons kalangan moderat, Agama dan terorisme (24/7/2009), Mengapa tumbuh di Jateng? (9/8/2009),**Teroris, umat dan ulama (13/8/2009), Islam bukan faktor lahirnya terorisme (14/8/2009), Islam direduksi dan dibajak (28/8/2009).*

Wacana yang dikembangkan Kompas dalam melihat keterkaitan Islam dan terorisme terjawab dalam berita-berita yang diturunkan. Secara tegas Kompas menyebut bahwa Islam bukanlah agama yang melahirkan terorisme di Indonesia. Wacana Kompas ini muncul dalam praktik di level meso dan makro. Artinya pada individu jurnalis yang membuat berita dan organisasi media secara keseluruhan memandang bahwa Islam bukanlah faktor yang melahirkan terorisme di Indonesia[[3]](#footnote-4). Untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam melihat keterkaitan Islam dan terorisme maka wacana tersebut ditempatkan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Wacana kedua yang menarik untuk dicermati adalah metode pemboman bunuh diri yang dilakukan para teroris dalam melakukan aksinya. Bunuh diri menjadi pilihan pelaku teror karena dianggap ampuh untuk menyerang target yang telah ditentukan[[4]](#footnote-5).

Beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya hubungan antara kepercayaan dan identifikasi terhadap politik Islam dengan dukungan terhadap terorisme dan bunuh diri di kalangan muslim. Meski demikian hubungan asosiatif antara kepercayaan agama dan dukungan terhadap terorisme dan bunuh diri, tidak bisa ditunjukkan secara nyata oleh para peneliti. Permasalahan utamanya adalah konotasi bahwa dukungan untuk terorisme bunuh diri menunjukkan fungsi dari kepercayaan relijius atau budaya khusus dan bukan kepercayaan agama secara universal. Peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris secara khusus merujuk pada organisasi Islam tertentu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara Islam dan terorisme bunuh diri. Teroris memanfaatkan komunitas relijius yang tidak kokoh pemahamannya dan miskin pengetahuan tentang Islam untuk melakukan aksinya. Terdapat dua alternatif hipotesis untuk menjelaskan bukti hubungan antara agama dan terorisme bunuh diri. Pertama, kelompok agama tertentu percaya bahwa memberi dukungan terhadap terorisme bunuh diri adalah sesuatu yang bisa diterima. Kedua, pada titik kepercayaan relijius tertentu meyakini bahwa di kehidupan akhirat para pelaku bunuh diri tersebut akan mendapatkan ganjaran yang setimpal[[5]](#footnote-6).

Studi tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit hubungan kausalitas antara Islam dan terorisme. Artinya Islam tidak secara langsung menjadi penyebab tumbuh dan maraknya aksi teror. Jika penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas maka setiap pemeluk Islam akan menjadi teroris. Pengandaian bahwa setiap pemeluk Islam akan menjadi pelaku teror tentu sebuah simplifikasi dan kesimpulan gegabah yang ditarik dari sebuah asumsi parsial.

Meski demikian munculnya wacana tentang keterkaitan antara Islam dan terorisme dalam konteks masyarakat yang justru mayoritas beragama Islam tentu menjadi sebuah pertanyaan besar. Sebuah pengingkaran dari fakta ketika mengatakan bahwa Islam benar-benar tidak terkait dengan aksi teror di Indonesia sementara bukti menunjukkan bahwa semua pelaku teror tersebut beragama Islam. Di sisi lain mengatakan bahwa Islam terkait langsung dengan berkembangnya terorisme di Indonesia juga sebuah kesalahan fatal mengingat mayoritas umat Islam justru tidak terlibat.

Jalan tengah selalu muncul dalam kebuntuan dua jalan yang tidak bertemu ujungnya. Demikian halnya dengan kedua wacana tersebut yang mengerucut dalam wacana baru yang menyebut para pelaku teror adalah oknum umat Islam yang tidak paham dengan konsep dasar agamanya. Wacana inilah yang menjadi dominan dalam pemberitaan Kompas. Dalam praktiknya setiap wacana yang mendapatkan tempat lebih besar dalam pemberitaan media menunjukkan adanya kesepakatan dalam konsepsi mikro, meso dan makro kepentingan dari entitas kebijakan media. Petikan berita berikut akan menunjukkan secara jelas wacana tersebut. “Islam direduksi dan dibajak” yang dimuat pada tanggal 28/8/2009.

”Ada dua tantangan yang dihadapi kaum Muslimin di dunia dalam mengusung konsep dan peran Islam sebagai rahmatan lil alamin sekarang ini, yaitu tantangan ketidakpahaman sebagian pemeluk Islam tentang agamanya dan tantangan penyimpangan pemahaman dan pembajakan Islam oleh kelompok garis keras tertentu,” ujar Atho.

Jalan tengah diantara dua kutub wacana dalam melihat keterkaitan Islam dan terorisme di Indonesia mendapat tempat lebih dominan dalam pemberitaan Kompas. Pilihan ini membawa konsekuensi bahwa Kompas tidak menyebut Islam sebagai penyebab munculnya terorisme dan sekaligus tidak memungkiri adanya sekelompok umat Islam yang terlibat. Secara ideologi nampak jelas upaya Kompas menempatkan diri di tengah dua fakta yang muncul. Pilihan logis dilakukan dengan cara menjatuhkan kesalahan kepada sekelompok umat Islam yang melakukan terror. Mereka disebut sebagai umat yang merusak dan tidak paham konsep Islam.

Hasil studi yang mengamati keterkaitan antara terorisme dengan pemahaman relijius berikut akan membantu menjelaskan wacana yang dikembangkan Kompas. Ada dua jenis terorisme yang terkait dengan pemahaman relijius. Pertama, terorisme relijius yang dikaitkan dengan kepentingan politik. Sebagai contoh peristiwa di Irak dan Afghanistan yang menggunakan wilayah sebagai tempat untuk mencari pengikut dan membenarkan tindakan. Pemahaman tentang perlunya membela tanah air sebagai bagian dari kewajiban relijius menjadi dasar yang digunakan. Kedua, terorisme relijius yang tidak memiliki tujuan politik langsung melainkan ditujukan untuk kepentingan ideologi global dengan target yang jelas. Tipe pertama disebut *political religious terorism* yang kedua *milleniaristic terorism*[[6]](#footnote-7).

Model serangan teror di Indonesia tidak secara langsung ditujukan untuk kepentingan politik seperti merebut kekuasaan atau bentuk protes terhadap sistem politik yang dijalankan. Serangan teroris di Indonesia lebih diarahkan sebagai bentuk balas dendam terhadap perilaku Amerika Serikat dan sekutunya yang memerangi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Sebuah kepentingan ideologis global yang menjadikan kepentingan Barat dan sekutunya sebagai target serangan teror. Serangan terhadap kepentingan Barat dan sekutunya nampak dari pemilihan target seperti hotel, warga negara, dan gedung kedutaan [[7]](#footnote-8).

Terorisme dengan berlandaskan kepercayaan relijius memiliki jangkauan serangan yang lebih luas daripada terorisme lokal yang mengejar kepentingan teritorial. Landasan kepercayaan menembus batas teritorial dengan tujuan melebihi kepentingan nasionalisme dan politik lokal. Kepercayaan relijius menjadi ideologi yang menembus batas kesukuan, nasionalisme, wilayah dan kepentingan politik praktis.

Penelitian tentang terorisme dan bom bunuh diri memiliki tiga dimensi yaitu: fokus terhadap pelaku bom bunuh diri, organisasi teroris dan komunitas dimana bom bunuh diri terjadi. Studi terhadap pelaku teror dan pelaku bom bunuh diri digunakan untuk mencari faktor yang mendorong individu melakukan aksi teror. Beberapa penelitian memfokuskan pada penyimpangan perilaku individual, kekuasaan personal, faktor sosial, pilihan rasional, fanatisme relijius, penyimpangan kognisi, balas dendam dan kekecewaan terhadap kondisi sosial. Teroris melakukan aksinya tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada elit politik dan membentuk opini publik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dengan komunitas yang mereka wakili. Dengan menggunakan aksi teror mereka menunjukkan eksistensi terhadap komunitas tersebut sehingga loyalitas bisa dipertahankan[[8]](#footnote-9).

Bom bunuh diri menjadi metode yang paling sering dilakukan para teroris yang berlandaskan kepercayaan. Sebuah analisa diberikan oleh Durkheim untuk melihat fenomena bunuh diri. Ketika seseorang melakukan bunuh diri, hal ini tidak disebabkan oleh keyakinannya bahwa bunuh diri merupakan tindakan yang benar namun lebih disebabkan karena mereka menganggap bunuh diri adalah sebuah tugas. Jika dia gagal dalam melaksanakan tugas tersebut maka ia tidak akan dihormati dan mendapatkan hukuman dari kelompoknya. Sanksi yang diberikan adalah sanksi agama atau kepercayaan. Kegagalan dalam melakukan bunuh diri membuat para pelakunya kehilangan kehormatan dari publik dan penolakan dari penduduk setempat terkait pemakamannya. Sanksi tersebut bagi para pelaku terror lebih menakutkan dari kematian. Sanksi dari masyarakat tersebut yang membawanya menjadi berani untuk membunuh dirinya sendiri. Dalam diri pelaku muncul keinginan untuk melaksanakan aksinya sampai mati daripada kembali ke masyarakat atau kelompoknya.[[9]](#footnote-10)

Dalam pandangan teroris, penilaian manusia tidak lagi menjadi faktor determinan dalam melakukan tindakan teror. Kepercayaan akan balasan di kehidupan yang akan datang membuat keberanian mereka muncul. Pengorbanan nyawa dianggap setimpal dengan balasan yang akan diterima di surga kelak. Beberapa berita Kompas mengangkat wacana tersebut untuk menunjukkan keheranan mereka terhadap logika para teroris. Berita berjuudul “Logika Bom Para Teroris” dan “Bunuh diri untuk menang” yang dimuat pada 21-7-2009 memberikan gambaran wacana tersebut. Berikut petikan berita berjudul Bunuh diri untuk menang” yang dimuat pada 21-7-2009.

Kematian menjadi tujuan utama dari tindakan bunuh diri dan bukan hanya merupakan konsekuensi yang hampir pasti. Karena itu, peledakan bom bunuh diri lebih dipandang sebagai peledakan bom ketimbang bunuh diri. Itulah sebabnya, ada yang menganggap dan bahkan berkeyakinan bahwa aksi bom bunuh diri adalah pengorbanan diri, sebuah kematian suci.

Wacana yang dikembangkan Kompas menyatakan dengan jelas bahwa praktik bunuh diri yang ditempuh para pelaku teror adalah manifestasi dari kepercayaan akan tindakan mereka yang dibenarkan keyakinan relijius. Bagi para pelaku teror tersebut meledakkan bom bukanlah tindakan bunuh diri melainkan sebuah tindakan yang benar menuju kematian suci. Serangan bom hanya sekedar sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Konsepsi Islam dalam melihat sebuah perjuangan suci dikenal dengan konsep Jihad. Konsep ini juga dipakai para pelaku teror untuk membenarkan tindakan mereka.

Pelaku yang sekaligus menjadi korban tindakan bunuh diri ditampilkan sebagai eksotika dalam pemberitaan utama media. Kematian mereka yang dirasakan tidak wajar, dengan cara meledakkan tubuh sendiri menggunakan bom ransel atau bom mobil merupakan hal yang tidak biasa dalam masyarakat. Selama ini tindakan bunuh diri digambarkan oleh media dalam bentuk gantung diri, menabrakkan badan ke kereta, minum racun, menikam diri sendiri dan bentuk bunuh diri lain yang lazim dilakukan. Tubuh mereka yang melakukan bunuh diri ditemukan penuh dengan luka, berdarah, menggelantung di pohon atau kusen rumah dengan lidah menjulur, dan mata melotot. Semua ini menjadi pemandangan yang sering dijumpai di masyarakat ketika menyaksikan fenomena bunuh diri.

Penggambaran para pelaku terorisme dengan menggunakan bom bunuh diri memiliki tipikal yang berbeda. Tubuh para pelaku teror yang hancur berantakan terkena ledakan bom tentu tidak bisa digambarkan dengan cara yang sama oleh media. Potongan tubuh, kepala, dan puing-puing hancurnya tubuh pelaku teror memberikan cara deskripsi yang berbeda bagi media. Ketidakutuhan tubuh pelaku teror menjadi eksotika tersendiri bagi pemberitaan media. Potongan kepala para pelaku terror yang terpisah dari badannya menjadi obyek foto yang diburu para jurnalis. Untuk menarik pemberitaan juga ditambahkan sketsa wajah pelaku teror sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pembaca akan identitas pelaku tersebut.

Persamaan dalam pemberitaan fenomena bunuh diri biasa dan bunuh diri para teroris adalah penempatan mereka dalam bingkai berita media. Bunuh diri dibingkai dalam pemberitaan yang menggambarkan kebodohan, keputusasaan, kesedihan, tindakan tidak logis dan penyimpangan perilaku. Perbedaan terletak pada efek kengerian yang ditimbulkan dari foto potongan kepala para pelaku terror. Tindakan bunuh diri para teroris juga dibingkai dalam pemberitaan yang menggambarkan aksi tidak berperikemanusiaan dan perlawanan terhadap hak hidup individu.

Beberapa organisi teror memberikan penghargaan kepada para pengikutnya yang berani melakukan aksi bom bunuh diri. Propaganda organisasi teroris dilakukan menggunakan media massa, website, poster dan pamflet untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya. Sebagai contoh Macan Tamil di Srilanka memberikan nama khusus kepada pengikutnya yang melakukan serangan bom dengan sebutan pahlawan. Masyarakat di Palestina mengadakan turnamen sepakbola dengan nama pelaku bom bunuh diri sebagai nama piala. Hamas di Lebanon mengadakan pemilihan “*martyr of the month*” yang menjadi kalender rutin organisasi tersebut. Sebagian besar organisasi teroris menggunakan figur kharismatik untuk menarik pengikut. Osama bin Laden di al Qaeda, Vellupillai Prabakharen di Sri Lankan Tamil Tigers, Abdullah Ocalan di PKK Turkey, dan al-Zarqawi di Iraq. Selain ketokohan pemimpinnya organisasi teroris seperti Hamas, Hezbollah, al Qaeda, Islamic Jihad, Iraq dan Afghanistan insurgents, dan pelaku bom bunuh diri lainnya mengaitkan pemahamannya dengan pendapat ulama seperti Sheikh Ahmad Yassin, Sayid Muhammad Hasayn Fadlalla, Shaikh Yusuf Qardawi, dan tokoh lain yang memiliki pemahaman sama[[10]](#footnote-11).

Pemimpin organisasi teroris membingkai pemikiran pengikutnya dengan berbagai cara. Bahasa memegang peran penting dalam proses menguatkan keyakinan para pelaku bom bunuh diri. Bahasa tidak hanya mampu mengkonstruksi simbol dari abstraksi pengalaman sehari-hari tetapi sekaligus menjadikan simbol tersebut sebagai realitas yang seolah nyata. Simbolisasi menjadi penting untuk menyederhanakan relaitas sehari-hari. Beberapa bahasa yang sering digunakan oleh pemimpin organisasi teroris untuk menyebut pengikutnya yang melakukan tindakan bom bunuh diri adalah: *amaliyya istishadiyya* (serangan terencana)*, amaliyya fida’iyya* (operasi perang)*, al Shahid* (sang sahid)*, mahaveera (*ibu yang pemberani)[[11]](#footnote-12).

Pandangan dari Sheikh Ahmad Yassin, Sayid Muhammad Hasayn Fadlalla, dan Shaikh Yusuf Qardawi yang dianggap menginspirasi pemahaman para pelaku teror di berbagai penjuru dunia mendapat koreksi dari beberapa pemikir Islam lainnya. Sheikh Zaid bin Muhammad bin Hady Al-Madkhaly memberikan pandangan tentang konsepsi Jihad dari para pemikir rujukan pelaku teror tersebut.

Berikut pernyataan dari Sheikh Zaid bin Muhammad bin Hady Al-Madkhaly. Orang-orang yang ekstrim di dalam penilaian Al-Irhab (terorisme) adalah mereka yang tertimpa oleh musibah At-Tanzhimat (aturan-aturan) rahasia dari kelompok-kelompok Hizbiyah untuk menentang segenap pemerintah di seluruh dunia Islam. Mereka menganggap bahwa pemerintah adalah orang-orang yang sudah kafir (keluar dari Islam), fasiq (berbuat kerusakan) dan zhalim (menganiaya), karena berhukum dengan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka bergerak dengan strategi untuk menggulingkan pemerintah dengan menggunakan berbagai cara seperti Al-Ightiyal (pembunuhan secara rahasia) terhadap para penguasa, peledakan bom di tempat-tempat umum maupun khusus sebagai bentuk balas dendam dan makar hizbiyah (kelompok). Aksi-aksi tersebut menyebabkan tersebarnya ketidakstabilan di masyarakat, dan terjadi goncangan keamanan. Hal ini disebabkan tindakan mereka menyusupkan bentuk irhab (terorisme) secara nyata maupun pemikiran ke tengah masyarakat[[12]](#footnote-13).

Wacana tersebut dalam konteks sosial masyarakat muslim di Indonesia dianut oleh kalangan moderat yang memposisikan diri di tengah dua kutub pemahaman Islam. Mereka bisa menerima konsepsi kehidupan bernegara dalam kerangka demokrasi tanpa mempertentangkan dengan nilai-nilai Islam yang dianut. Konteks pemberitaan Kompas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semua alam) yang banyak dikutip dalam berita terorisme secara lugas memposisikan wacana tersebut dalam konteks masyarakat Islam moderat.

Di level meso dan makro organisasi media, wacana Kompas selaras dengan konteks sosial masyarakat muslim Indonesia. Kondisi ini tentu akan berbeda dalam konteks masyarakat di Irak dan Afghanistan yang memiliki akar pemahaman Islam berbeda. Konsep demokrasi sebagai sistem kenegaraan diterima dengan terbuka oleh masyarakat muslim di Indonesia, sementara di negara kawasan Timur Tengah demokrasi masih menjadi konsep yang dipertentangkan keberadaannya.

Pemahaman ideologi dari para pelaku teror di Indonesia melebihi batasan ideologi negara dan cenderung mengidentikkan diri dengan pelaku teror global. Pernyataan tersebut menjadi wacana dominan yang dibentuk oleh media massa dengan menempatkan kepentingan negara dalam posisi lebih penting dari alasan ideologis para pelaku teror. Dalam kajian ideologi Althusserian cara bekerja dari ideologi ini adalah dengan melakukan interpelasi (pemanggilan) di mana individu yang merasa namanya disebut atau dipanggil secara otomatis akan menoleh ke arah kekuatan yang memanggil tadi[[13]](#footnote-14).

Para teroris merasa mendapat panggilan dari ideologi global tentang perlunya tindakan teror untuk melawan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Tindakan mereka melawan kepentingan Barat adalah realisasi dari ideologi tersebut. Ideologi negara dalam konteks ini tidak mampu menarik kembali para teroris tersebut dari ajakan ideologi global. Penanaman ideologi negara dianggap gagal karena tidak mampu melahirkan hubungan imajiner antara pelaku teror tersebut dengan bayangan entitas negara. Nasionalisme sebagai komunitas yang dibayangkan tidak lebih kuat dari daya tarik ideologi teror global. Dalam kerangka pikir para teroris nasionalisme bukan pilihan imajiner yang mereka bayangkan.

Tabel tentang akar penyebab terorisme dan faktor yang menguatkan proses tersebut akan membantu menjelaskan fenomena berkembangnya terorisme. Kegagalan penanganan terorisme bisa terjadi ketika terjadi kesalahan dalam menganalisa faktor penyebab dan faktor yang menguatkan proses tersebut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Root causes | Trigger causes |
| 1 | Rapid modernization and urbanization are strongly correlated with the emergence of ideological terorism | Events that call for revenge or  action (i.e. contested elections,  police brutality, etc.) |
| 2 | Lack of Democracy, civil liberties and the rule of law is a precondition to many forms of domestic terorism | Lack of opportunity for political participation |
| 3 | Historical antecedents of political violence | Concrete grievances among a subgroup of a larger population (articulated clearly by a leader figur) |
| 4 | Repression by foreign  occupation or colonial powers | Importance of belonging to a strong group for development of personal identity |
| 5 | Perceived feelings of  discrimination based on  ethnic or religious origins | Peace talks |

Table IV.1 Most Relevant Root and Trigger Causes[[14]](#footnote-15)

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab berkembangnya terorisme di Indonesia tidak bisa dijawab dengan satu penyebab saja. Hasil penelitian tersebut membantu analisa akar terorisme yang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia penyebab terorisme memiliki konteks sosial yang berbeda dengan tipikal masyarakatnya yang khas. Dalam komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia, faktor penyebab terorisme memiliki relasi dengan akar keyakinan dari para pelakunya.

Wacana keterkaitan antara agama dan terorisme di Indonesia menjadi bahan pemberitaan yang menarik. Dalam kaidah nilai berita, semakin besar potensi pro dan kontra yang dimiliki suatu masalah maka daya tariknya akan semakin besar pula. Pembahasan tentang keterkaitan antara agama dan teroris menjadi wacana yang menarik pro dan kontra berbagai pihak. Pemerintah juga menaruh kepentingan untuk menjaga persatuan sehingga isu agama menjadi sensitif untuk dibicarakan.

1. **Media dan terorisme**

Menurut Althusser ideologi berbasis material. Dalam masyarakat kapitalis kontemporer, ideologi selalu berjalan melalui apa yang disebut sebagai “*ideological state apparatuses* (ISA)*”.* Mereka yang menanamkan ideologi tersebut bisa berasal dari negara, tokoh agama, partai politik, keluarga, hukum, sistem partai politik, serikat dagang, komunikasi dan budaya.[[15]](#footnote-16). Relasi antara penanaman ideologi dengan keberhasilan untuk mengatur tindakan warga negara menjadi menarik ketika dikaitkan dengan peran media massa. Dalam kasus terorisme ketika ideologi negara tidak berhasil membendung panggilan ideologi global menunjukkan dominasi peran media dalam menyebarkan dan memantapkan ideologi global tersebut. Pembahasan tentang keterkaitan antara media dan terorisme akan diuraikan pada bagian ini.

Fakta bahwa teroris memanfaatkan media dapat ditarik jauh ke belakang, antara lain ke kasus pembunuhan Empress Elizabeth (Tuchman, 1972). Pelakunya, Luchini, seorang yang gemar melakukan kliping berita, menyatakan: "Saya telah lama ingin membunuh orang penting agar bisa masuk koran!" Pada tataran teoritis, hal ini dinamakan *a violent communication strategy*. Pelaku teror bertindak sebagai sender, para korban menjadi *message generator*, dan *receiver* adalah kelompok yang dianggap musuh atau publik secara luas. Menurut studi Schmid & Graaf ada beberapa pemanfaatan yang dilakukan teroris terhadap media. Pemanfaatan secara aktif meliputi: mengomunikasikan pesan-pesan ketakutan kepada khalayak luas; mempolarisasi pendapat umum; mencoba menarik anggota baru pada gerakan teroris; mengecoh musuhnya dengan menyebar informasi palsu; mengiklankan diri dan menyebabkan mereka merasa terwakili; membangkitkan keprihatinan publik terhadap korban untuk menekan agar pemerintah melakukan kompromi atau konsesi; mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang tidak dikehendaki dengan harapan berita teror mereka mengisi halaman depan media; dan membangkitkan kekecewaan publik terhadap pemerintah[[16]](#footnote-17).

Kajian dari Soriano menjelaskan bagaimana hubungan antara media dan terorisme. Soriano memulai eksplorasinya tentang hubungan antara media dan terorisme dengan menggunakan kata dari Marshall McLuhan, *“without communication, terorism would not exist*”. Pemikiran terorisme membutuhkan peran dari media untuk mewujudkan eksistensinya. Melalui media, pesan teroris dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih meyakinkan. Menurut Brigitte Nacos ada tiga tujuan utama teroris yang berlaku secara universal yaitu: menarik perhatian, mendapat pengakuan, dan mendapat penghormatan serta pengesahan. Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada simbiosis hubungan antara media dan teroris[[17]](#footnote-18). Brigitte Nacos menggabungkan aspek-aspek tujuan tersebut menjadi sebuah kerangka kerja dimana teroris memiliki empat ketergantungan umum terhadap media ketika mereka melakukan serangan. Keempat kerangka kerja tersebut adalah *gain attention and awareness of the audience, recognition of the organization’s motives, gain the respect and sympathy,* dan *gain a quasi-legitimate status and a media treatment similar to that of legitimate political actors*[[18]](#footnote-19).

Kerangka kerja pertama adalah *Gaining Attention and Awareness; Spreading Fear* yakni sebuah upaya untuk mendapat perhatian publik dengan cara menyebar ketakutan. Tindakan para teroris yang bersifat lokal bisa tersebar secara nasional bahkan internasional dengan pemberitaan media. Penyebaran berita yang memuat pesan para teroris menunjukkan peran penting media dalam mendukung aksi teror. Strategi untuk mendapat perhatian merujuk pada upaya menunjukkan pentingnya tindakan para teroris, mengintimidasi pemirsa, pemerintah dan pengambil keputusan politik melalui ketakutan yang disebarkan[[19]](#footnote-20).

Tujuan kedua adalah *recognition of motives*. Tujuan ini secara konsep berhubungan dengan agenda setting and framing. Teroris tidak hanya ingin diketahui oleh audiens tetapi juga menyampaikan pesan dan motif dibalik tindakan mereka. Tindakan bom bunuh diri yang digunakan para teroris akan menimbulkan pertanyaan di benak audiens tentang motif tindakan mereka. Media melalui *frame* pemberitaan yang dikembangkan akan memberikan penjelasan mengenai motif yang dimiliki oleh para teroris tersebut. Tujuan ketiga adalah *gaining respect and sympathy*. Audiens yang menyaksikan tindakan teroris bukan hanya audiens yang bisa ditakuti tetapi juga mereka yang secara potensial akan mendukung aksi teror yang terjadi. Kelompok yang memiliki akar ideologi serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan para pelaku teror berpotensi untuk memberikan rasa hormat dan simpati. Tujuan keempat dari teroris dalam menggunakan media adalah *gaining legitimacy*. Ketika teroris secara rutin tampil di media, mereka memposisikan diri sebagai wakil resmi dari kelompoknya. Audiens bisa setuju dengan tindakan teroris atau justru menolak, namun mereka akan melihat bahwa kelompok teroris tersebut menjadi wakil dari kepentingan tertentu. Kelompok teroris seolah mendapat pengesahan dari para pendukung mereka yang mendapat informasi melalui media. [[20]](#footnote-21).

Pemanfaatan secara aktif menunjukkan bagaimana upaya para teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan efek nyata dari tindakan mereka. Selain penggunaan media secara aktif, teroris juga menggunakan media secara pasif diantaranya: sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara teroris; mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media; mendapat informasi tentang kegiatan terkini pasukan keamanan menghadapi teror yang sedang mereka lakukan; menikmati laporan media yang berlebihan tentang kekuatan teroris hingga menciptakan ketakutan pihak musuh dan mencegah keberanian polisi secara individual; mengidentifikasi target-target selanjutnya; dan mencari tahu reaksi publik terhadap tindakan mereka[[21]](#footnote-22).

Hubungan antara media dan teroris tidak hanya nampak pada penggunaan media untuk kepentingan para teroris. Di sisi lain, media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka. Tragedi berdarah, peristiwa yang menarik perhatian dan sisi dramatis dari aksi teror selalu menjadi komoditi yang bertiras tinggi bagi media. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan bagaimana media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka, pertama, *Exacerbating factors: Competition and Speed.* Wilkinson and Ockrent menyebutkan dua faktor penting dari perubahan kerja media yaitu kompetisi dan kecepatan. Kompetisi dan kecepatan menuntut media bekerja dengan lebih baik agar bisa bersaing. Dalam kompetisi, materi berita yang menarik akan menentukan kemampuan untuk menarik audiens. Kecepatan menuntut media untuk mendapat berita dari sumber pertama dalam tempo yang singkat. Aksi terorisme menjadi materi menarik bagi pemberitaan sekaligus membutuhkan kecepatan untuk menyiarkannya. Oleh karena itu media berlomba untuk mendapatkan kesempatan pertama dalam pemberitaan terorisme. Ada dua hal yang berkumpul secara bersamaan yaitu kasus yang menarik dan isu global yang dibicarakan di berbagai negara[[22]](#footnote-23).

Bagi Kompas, terorisme juga memiliki daya tarik tersendiri untuk mengisi berita utama. Terorisme memiliki magnitude yang kuat sehingga mampu menarik minat pembaca[[23]](#footnote-24). Dalam kerangka kepentingan ekonomi Kompas, berita terorisme akan menjadikan oplah penjualan naik. Kesimpulan tersebut bisa jadi tentatif namun satu hal yang harus dicermati bahwa daya tarik kasus terorisme dalam isu nasional tidak dapat dipungkiri. Kognisi wartawan Kompas tentang posisi berita terorisme selaras dengan kebijakan media tersebut untuk menempatkannya sebagai topik utama pemberitaan.

Salah satu tujuan penggunaan media oleh teroris adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan perhatian publik terhadap aksi mereka. Propaganda melalui media akan meningkatkan pengetahuan dan perhatian dari publik terhadap isu maupun ideologi yang disebarkan para teroris. Di sisi lain pemerintah sebagai institusi resmi yang menangani kasus terorisme juga berpotensi untuk merubah kebijakan politiknya[[24]](#footnote-25).

Relasi antara kepentingan propaganda teroris dengan kepentingan nilai berita dari media bertemu dalam formulasi teks yang lahir. Hubungan simbiosis antara media dan teroris dalam formulasi teks nampak dalam pemberitaan yang menjadikan topik tersebut sebagai agenda utama. Media membutuhkan isu terorisme sebagai berita utama, sementara teroris berusaha untuk menjadi agenda utama dari pemberitaan media. Bertemunya dua kepentingan antara teroris dan media memberikan pengaruh bagi persepsi publik dan reaksi pemerintah dalam menangani terorisme.

Pasca serangan Bom Bali pada tahun 2002 pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penanganan aksi terror di Indonesia. Pemerintah membentuk satuan khusus di Kepolisian untuk menangani aksi terror di Indonesia. Detasemen Khusus (Densus) 88 yang dibentuk pada tahun 2003 menunjukkan reaksi nyata dari pemerintah untuk menangani terorisme di Indonesia[[25]](#footnote-26). Cara pemerintah Indonesia dalam menangangi terorisme juga mendapat pujian dari banyak negara. Penanganan terorisme dengan pendekatan *soft approach* tidak hanya mengedepankan penangkapan dan pencegahan aksi terror tetapi juga melakukan deradikalisasi pemahaman. Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, ormas Islam, Lembaga Pemasyarakatan, tokoh agama dan pondok pesantren untuk berdialog dengan para pelaku terror sehingga pemikiran mereka bisa dirubah[[26]](#footnote-27). Pelajaran dari konflik Poso, Ambon, dan munculnya gejala separatisme di berbagai daerah membuat pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam penanganan terorisme agar tidak memperbesar potensi konflik yang ada.

1. **Kebijakan Media dan Proses Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme**

Dominasi wacana merujuk pada upaya dari kelompok dominan untuk menunjukkan kemampuannya mempengaruhi kelompok marjinal. Ada sebuah pengandaian bahwa wacana yang dilontarkan oleh kelompok dominan dengan sendirinya akan mempengaruhi cara berfikir dari sebagian besar audiens. Dalam sebuah teks yang lahir dari formulasi kerja redaksi, apa sesungguhnya yang disebut sebagai wacana dominan dan apa yang disebut sebagai wacana kelompok marjinal sulit untuk dibedakan. Kontestasi wacana tidak bisa dibedakan secara hitam dan putih dalam kotak-kotak kepentingan kelompok tertentu. Stigmatisasi yang lahir dari mekanisme kerja redaksi menjadi bentuk relasi antara wacana individual dalam bungkus kebijakan media. Relasi antara media dan teroris dapat digambarkan sebagai sebuah simbiosis mutualis yang saling membutuhkan.

Wacana mengenai pelaku teroris telah membentuk dan dibentuk oleh Koran Kompas. Maksudnya adalah koran Kompas telah membentuk sekaligus mendefinisikan, peristiwa-peristiwa sosial jenis apa saja yang layak disebut sebagai tindakan terorisme[[27]](#footnote-28). Di sisi lain koran Kompas sendiri pun telah dibentuk oleh peristiwa-peristiwa terorisme sebagai penerbitan pers yang merepresentasikan tipe-tipe terorisme dalam pemberitaan mereka[[28]](#footnote-29). Mekanisme ini menunjukkan pertalian antara kepentingan dari media akan hadirnya peristiwa yang memiliki nilai berita dan kepentingan tidak langsung dari para teroris untuk mendapatkan publikasi.

Dalam dominasi wacana dominan, definisi teror, teroris dan terorisme yang memiliki beragam artikulasi disederhanakan menjadi definisi baku. Kata teror dan teroris sendiri sebenarnya bisa berartikulasi dalam berbagai konteks. Noam Chomsky misalnya merujuk pada terorisme negara (state terorism) untuk melabeli berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai aksi internasionalnya, seperti yang terjadi di Vietnam, Irak dan Afganistan. Bagi pemerintah Amerika Serikat, yang layak diberi label teroris adalah kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kepentingan nasional dan internasional negara adikuasa ini, seperti Al Qaida dan Taliban yang menjadi musuh utama militer Amerika Serikat mulai awal milenium kedua ini. Sebagai jalan tengah, kata “teroris” dapat digunakan untuk merujuk pada organisasi dimana anggotanya melabeli diri mereka sebagai “pejuang kemerdekaan”, “tentara gerilya” atau “pejuang revolusioner”. Aksi mereka pada umumnya dalam bentuk aksi bom bunuh diri, pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan pesawat dan sejenisnya. Aksi-aksi ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai aksi kekerasan, namun lebih merupakan bentuk komunikasi politik yang berwujud pada penggunaan kekerasan, yang dilakukan di luar prosedur resmi[[29]](#footnote-30).

Wacana mengenai terorisme bukanlah kumpulan pernyataan yang dikelompokkan dalam suatu tema atau topik pembicaraan tertentu, bukan pula rangkaian dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari latar belakang institusional tertentu. Wacana mengenai terorisme merupakan pengelompokan pernyataan-pernyataan yang diregulasikan dengan aturan-aturan internal yang merujuk pada wacana mengenai terorisme itu sendiri. Artinya adalah wacana mengenai terorisme dibentuk oleh mekanisme-mekanisme internal dalam kinerja media meskipun faktor-faktor ekonomi dan kultural mempunyai kemungkinan untuk membentuknya.[[30]](#footnote-31)

Sebagai contoh, *Kompas* menempatkan subyek (polisi) sebagai aktor yang tidak dihadirkan secara terang-terangan ketika memberantas terorisme, dan sebaliknya obyek (teroris) yang harus ditampilkan secara menonjol. Proses tersebut telah memiliki mekanisme dan aturan-aturan tetap yang bersifat rutin, sehingga seolah-olah tanpa sadar selalu dilakukan secara konsisten (tetap)[[31]](#footnote-32). Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror tidak pernah ditampilkan secara jelas oleh media. Penggunaan seragam yang menutup seluruh badan dan kerahasiaan dari anggota tim sangat dilindungi oleh media. Hal ini berbeda dengan anggota teroris yang ditampilkan secara jelas baik wajah, pakaian, rumah tempat tinggal, bahkan anggota keluarganya. Dalam proses lahirnya berita terorisme mekanisme internal menentukan siapa yang menjadi subyek dan siapa yang menjadi obyek.

Mekanisme atau aturan-aturan pembentukan wacana (*discursive formation*) yang telah dianggap pasti dan beroperasi seakan tanpa sadar itu dapat ditelusuri berbagai kategori proseduralnya,[[32]](#footnote-33) yaitu: Pertama, kategori yang melibatkan aturan-aturan yang mengontrol fakta yang dapat atau boleh dibicarakan. Inilah aturan-aturan yang berkaitan dengan kemunculan obyek-obyek wacana. Dalam wacana mengenai terorisme yang direpresentasikan *Kompas*, obyek-obyek wacana itu berupa penangkapan pelaku teror dengan cirri-ciri tertentu. Aksi teroris dengan beragam simbol fisik dan sosial yang menyertainya telah menjadi obyek dalam pemberitaan media. Kedua, kategori yang berkaitan dengan siapa atau pihak mana yang diperbolehkan untuk berbicara dan membicarakan kasus-kasus terorisme itu.

Dalam kaitan ini yang dimaksud tidak lain adalah pihak polisi yang berkedudukan sebagai subyek meskipun tidak terlalu ditonjolkan kehadirannya, terutama sebagai sumber pemberitaan. Polisi selalu menjadi narasumber resmi dan dianggap paling layak diwawancarai ketika sebuah peristiwa terjadi[[33]](#footnote-34). Ketiga, kategori yang berhubungan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang mengasumsikan dapat diterima sebagai pengetahuan dalam wacana mengenai terorisme. Misalnya, perbuatan menyembunyikan buron, menikahkan anaknya, memberikan bantuan dana dan menyiapkan persenjataan dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Secara sederhana mekanisme atau aturan-aturan pembentukan wacana dalam pemberitaan terorisme dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertama | Kedua | Ketiga |
| * aturan-aturan yang mengontrol fakta yang boleh dibicarakan | * siapa, pihak mana yang boleh berbicara | * konsep dan teori yang dapat diterima sebagai pengetahuan dalam wacana |
| Contoh:   * penangkapan teroris * simbol fisik dan sosial yang melekat pada teroris | Contoh:   * polisi, tokoh masyarakat, kepala desk anti teror | Contoh:   * menyembunyikan buron, menikahkan anaknya, memberikan bantuan dana, menyiapkan persenjataan |

Tabel IV.2 : Gambaran mekanisme pembentukan wacana

Media secara rutin melakukan mekanisme kerja yang seolah nampak tidak sadar dalam memproduksi wacana. Meski demikian proses tersebut berada dalam mekanisme rutinitas kerja media. Rutinitas media menunjukkan bahwa setiap lembaga media diandaikan memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan setiap jenis berita yang akan diturunkannya. Proses ini secara umum diformulasikan sebagai upaya untuk memenuhi nilai berita (*news value*). Beberapa pertimbangan untuk mengukur kadar nilai berita adalah nilai penting dan kemenonjolannya (*importance/prominence*), sisi manusiawi (*human interest*), kontroversi, ketidaklaziman, aktualitas, serta kedekatan.[[34]](#footnote-35)

Proses stigmatisasi yang dilakukan oleh media tidak lepas dari kebijakan media yang dijalankan. Sebuah teks yang lahir dari formulasi kebijakan media melewati beragam tahapan yang ada dalam media. Varian stigma yang muncul dalam pemberitaan Kompas tentang terorisme nampak sebagai formulasi yang lahir dari kebijakan media[[35]](#footnote-36). Istilah teroris yang kemudian melekat dengan aktifis Islam lahir dari proses stigmatisasi sosial. Mereka yang telah diberi stigma tidak lagi dilihat sebagai individu, melainkan sebagai unsur sebuah kelompok yang sudah didiskreditkan[[36]](#footnote-37). Artinya adalah stigmatisasi mengakibatkan pihak Yang Lain disingkirkan atau dieksklusikan dari “kita” dan ditempatkan ke dalam kelompok “mereka”.[[37]](#footnote-38) Pelaku, keluarga dan daerah asal teroris menjadi sosok Yang Lain (*the Other*) yang diposisikan dalam justifikasi media tentang tindakan terorisme yang mengidentifikasi sebagai Diri (*the Self*). Pada sisi yang lain, definisi terorisme yang memiliki sejumlah karakteristik, tenggelam dalam definisi media. Stigmatisasi yang diberikan menyederhanakan istilah terorisme dengan asosiasi terhadap kelompok dan keyakinan ideologis tertentu.

Peran media sebagai subyek secara aktif mendefinisikan dan memberikan stigmatisasi terhadap tindakan terorisme. Ukuran dan karakteristik pelaku teror menjadi panduan bagi masyarakat dalam menyebut aksi teror dan mendefinisikan pelaku teror. Stigmatisasi yang diberikan media menjadi acuan bagaimana sebuah aksi teror didefinisikan dan kepada siapa stigma diberikan. Sebagai contoh Kompas menyebut keterlibatan Jamaah Islamiyah dalam aksi teror di Indonesia. Penyebutan nama organisasi membawa implikasi terhadap anggota dan bekas anggota yang dianggap terlibat dalam kegiatan terorisme. Kompas menggunakan sumber resmi seperti kepolisian untuk mendukung opini tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa fakta yang disajikan tidak berimplikasi negatif.

Sebagai contoh penggambaran keluarga teroris dalam berita Kompas membawa implikasi pada menempelnya stigma tersebut pada mereka. Penyebutan “keluarga teroris” merupakan pilihan kata dengan stigma melekat pada sebutan tersebut. Terkait dengan penyebutan tersebut wartawan Kompas memiliki alasan tersendiri. Berikut petikan petikan pernyataannya:

Penulis: menurut anda bagaimana ekspos keluarga teroris dalam berita Kompas?

Wartawan Kompas:

*Di satu sisi pemberitaan ttg keluarga teroris tidak baik untuk citra orang-orang itu. Karena belum tentu keluarga tersebut mengetahui bahkan sepahan dengan sang teroris. Di sisi lain, media (terutama elektronik) biasanya butuh unsur dramatis yang bisa tersaji bila dapat tempat asal-usul si pelaku, dan tanggapan keluarga. Menurut saya pribadi, asal-usul tetap boleh ditelusuri, supaya ketahuan di saat mana, dan ketemu dengan siapa, si teroris yang dulu alim bisa berubah beringas. Tapi, ekspose tentang keluarga harus dibatasi. Cukup dipantau saja.  Baru kalau sudah akan dimakamkan, memang menjadi ”kuasa’ keluarga untuk bicara harapan mau dikemanakan jasad si teroris ini nanti*.

Stigmatisasi lain yang muncul di Kompas terkait dengan simbol agama dan pentahbisan teroris. Sebuah ironi ketika wacana berbeda tentang keterlibatan Jamaah Islamiyah (JI) tidak mendapat tempat yang cukup di ruang media. Sosok yang alim, tokoh agama, rajin ke masjid, aktifis dakwah, kyai desa, panutan perilaku, sumber pengetahuan dan ramah kepada masyarakat kemudian di justifikasi dengan kalimat “namun sayang semua itu hanya kedok” untuk menunjukkan jati diri pelaku sesungguhnya.

Berikut petikan salah satu berita yang memuat stigmatisasi pentahbisan pelaku teror.

Terungkaplah kedok sosok tokoh agama di Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Bahrudin Latif, yang menjadi orang dekat Noordin. Belakangan Bahrudin bahkan disebut sebagai mertua Noordin. (dikutip dari berita berjudul “Mengapa tumbuh di Jateng? Yang dimuat 9-8-2009)

Ada pemahaman yang benar dalam kognisi wartawan tersebut bahwa melibatkan keluarga teroris dalam pemberitaan akan membawa konsekuensi pada anggota keluarga tersebut. Posisi mereka yang tidak terlibat dalam aksi teror harus menanggung stigma yang diberikan media. Dalam posisi normal wartawan tersebut menyadari implikasi dari penyebutan keluarga teroris dalam pemberitaan. Namun ketika terjun mencari fakta dan menulis berita kesadaran tersebut diselimuti bayangan kepentingan nilai berita yang harus diriah. Faktor kelengkapan berita dan pembahasan yang mendalam tentang fakta yang ditemukan menjadi lebih diutamakan daripada pertimbangan implikasi pemberitaan.

Kesadaran dalam benak wartawan tentang implikasi dari berita yang dibuatnya berlawanan dengan manifestasi teks berita yang dibuat. Logika kerja tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman personal di level meso, kebijakan media di level makro dan manifestasi produk dalam bentuk teks. Proses stigmatisasi dalam kerangka kebijakan media merupakan proses berjenjang yang melibatkan banyak unsur dan kepentingan dalam media.

Berikut mekanisme singkat kerja internal Kompas dalam proses lahirnya suatu berita.

Ide Berita:

* Penugasan redaksi
* Kreatifitas wartawan

Inti berita

Rapat redaksi

Redaktur

Penyelaras bahasa

Penyelaras bahasa

Lay out

Wartawan menyelesaikan penulisan berita

Percetakan

Bagan. IV.1 Alur Berita Kompas

Sumber: Disarikan dari wawancara dengan wartawan Kompas

Wartawan memperoleh ide liputan berita dari penugasan redaksi dan kreatifitas individu. Tahap selanjutnya wartawan mencari bahan berita dengan melakukan investigasi dan bahan-bahan sekunder. Inti berita yang telah dibuat oleh wartawan dimasukkan ke redaksi sebagai bahan rapat. Redaktur menentukan berita dari wartawan tersebut akan ditempatkan sebagai *headline* atau berita biasa. Wartawan tetap menulis berita tersebut sampai lengkap kemudian dikirim ke redaktur. Setelah di edit redaktur, berita dimasukkan ke penyelaras bahasa dan selanjutnya ke bagian lay out. Bahan berita tersebut dikirim via internet ke percetakan.

Dalam proses stigmatisasi terorisme yang dilakukan Kompas, pertanyaan menarik yang diajukan adalah apakah mekanisme kerja internal media dan faktor ekonomi politik berjalan bersama dalam memberikan definisi tersebut?. Apakah kebijakan media lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh wacana media global ketika mendefinisikan terorisme?. Ciri-ciri pelaku terror yang digambarkan dengan jelas apakah murni fakta pemberitaan atau justru mekanisme justifikasi kebenaran stigma?. Dalam garis kerja Kompas kesadaran individu jurnalis untuk tidak melakukan stigmatisasi pemberitaan ternyata tidak menjadi manifestasi teks. Keadaannya justru berkebalikan karena teks yang dihasilkan sarat muatan stigma. Standard untuk menentukan apakah suatu berita disebut netral atau tidak menjadi wujud dari kebijakan suatu media. Kelengkapan fakta dan standar untuk mencapai nilai berita tertentu menjadi alasan untuk menyebut tindakan stigmatisasi adalah suatu kewajaran.

Catatan berikutnya adalah relasi sumber resmi seperti pemerintah dan kepolisian dalam proses stigmatisasi pelaku terror menguatkan bagaimana wacana dominan dilestarikan. Kesepakatan antara pemegang kuasa politik dan media dalam pemberitaan terorisme terjalin dalam kerangka saling membutuhkan. Polisi membutuhkan media untuk memberitakan kinerja mereka dalam menangangi terorisme. Di sisi lain media membutuhkan sumber terpercaya untuk menguatkan fakta yang diperoleh.

Wacana tentang terorisme dalam berita Kompas lebih nampak sebagai sebuah penguatan dari definisi terorisme yang diungkapkan media global termasuk faktor penyebab dan ciri pelakunya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim upaya untuk membedah akar terorisme secara sederhana dikaitkan dengan keyakinan beragama. Faktor penyebab lain seperti kemiskinan, ketidakadilan dan kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi warganya tidak menjadi topik menarik untuk diberitakan.

Model pemberitaan seperti ini mengisyaratkan kurangnya kemauan dan kemampuan media untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam masalah terorisme. Kebijakan media menjadi rumusan yang sederhana dengan asumsi jika ada peristiwa terorisme maka kemungkinan pelaku, lokasi, dan faktor penyebabnya sudah ditentukan. Demikian halnya dengan asosiasi sebab akibat dari munculnya terorisme dan siapa yang harus diwawancarai dan siapa yang harus dipersalahkan. Mekanisme sederhana ini sepintas nampak logis dan merupakan kelaziman. Namun sesungguhnya kondisi tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana mekanisme pembentukan wacana telah terstruktur dalam kognisi dan konteks sosial berita itu dilahirkan. Kondisi yang seolah sudah melembaga tersebut diterima sebagai kewajaran dalam kinerja media dan menghasilkan ilusi kebenaran dalam benak awak media.

Kesadaran personal bahwa fakta yang dihasilkan, berita yang disusun, kata yang dipilih dan manifestasi teks dalam media yang sarat stigmatisasi berhenti pada level kognisi. Pembenaran untuk memenuhi kaidah nilai berita dan ilusi menghadirkan berita yang dibutuhkan masyarakat menjadi justifikasi untuk membenarkan proses kerja internal media.

1. Ada tiga makna stigma, yakni: (1) cap pada tubuh penjahat atau hamba sahaya; (2) tanda noda atau parut; dan, (3) ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh perilaku yang menyimpang. Bruce G. Link and Jo C. Phelan, "Conceptualizing Stigma", Annual Review of Sociology, 2001, p.363 Penulis memperoleh versi pdf dari resume buku “Presentation of Self in Everyday Life “ karya Erving Goffman, 1959, Doubleday Anchor Books Doubleday & Company,, inc. Carden city, New York . [↑](#footnote-ref-2)
2. Salah satu pembahasan yang penting dalam critical discourse analysis adalah melihat bagaimana hubungan antara wacana, kekuasaan dan akses. Power berkaitan dengan pembahasan hubungan kelompok social, organisasi dan institusi. Kekuasaan berdasar pada keistimewaan akses yang dimiliki karena kepemilikan modal social seperti pekerjaan, kekayaan, kepintaran, ketokohan dll. Baca:Teun A. van Dijk*,*  *Discourse, power and access*, van Dijk, T. A. (1993c) 'Principies of critical discourse analysis', *Discourse and Society,* 4, 249-83. [↑](#footnote-ref-3)
3. Berikut petikan wawancara dengan wartawan Kompas terkait persoalan tersebut. “ pertanyaan: apakah maraknya terorisme di Indonesia terkait dengan keyakinan agama tertentu dalam hal ini Islam? Jawaban: tidak, terorisme yang marak saat ini menurut saya murni kriminal. Meski ada kait-mengkait dengan sudut pandang kepercayaan tertentu, terorisme tetap bisa dilakukan oleh siapa pun dengan alasan apapun. [↑](#footnote-ref-4)
4. Peristiwa Bom Bali 1 dan 2, Bom Kuningan dan rangkaian serangan bom lainnya menggunakan metode bom bunuh diri untuk menyerang target yang telah ditentukan. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kelompok Jamaah ISlamiyah, Al Qaeda dan Jihad Islam selalu diidentikan dengan kelompok yang melakukan aksi terror. Dikutip dari Haddad & Khashan, 2002,Brooks, 2002; Calvert, 2002 2003 dalam Jeremy Ginges, *Religion And Support For Suicide Bombing*, 2006, Michigan: University of Michigan hal 3-4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Di Indonesia aksi terorisme yang dilakukan oleh berbagai kelompok mengacu pada kepentingan politik juga terutama terkait ketidaksetujuan dengan konsep demokrasi. Concepts of Terrorism, *Analysis of the rise, decline, trends and risk,*  2008, COT Institute, Netherland [↑](#footnote-ref-7)
7. Dalam peristiwa Bom Bali warga negara Australia yang menjadi sekutu Amerika banyak menjadi korban. Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton menjadi simbol serangan dan kebencian terhadap Barat. Muhammad, Ardison, 2010, Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan, Surabaya:Liris hal:14 [↑](#footnote-ref-8)
8. Gill, Paul, 2007, *A* *Multi-Dimensional Approach to Suicide Bombing*, School of Politics and International Relations, University College Dublin: Ireland, IJCV : Vol. 1 (2) 2007, hal: 144 [↑](#footnote-ref-9)
9. Durkheim, E. (1979). *Suicide: A study in sociology*. New York City: The Free Press. Baca Philip Thomas Holdredge, A Durkheimian Explanation for Suicide Terrorism, [↑](#footnote-ref-10)
10. Gill, Paul, 2007, *A* *Multi-Dimensional Approach to Suicide Bombing*, School of Politics and International Relations, University College Dublin: Ireland, IJCV : Vol. 1 (2) 2007, hal: 144-146 [↑](#footnote-ref-11)
11. Julukan ibu pemberani diberikan kepada mereka yang merelakan anaknya utuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Berger, Peter, and Thomas Luckmann. 1966 hal: 55. *The Social Construction of Reality:A Treatise in the Sociology of Knowledge.* London: Penguin. Dikutip dari: Gill, Paul, 2007, *A* *Multi-Dimensional Approach to Suicide Bombing*, School of Politics and International Relations, University College Dublin: Ireland, IJCV : Vol. 1 (2) 2007,hal:148 [↑](#footnote-ref-12)
12. Baca kitab Al-Irhab Wa Atsaruhu ‘Alal Afradi Wal Umam (Terorisme dan dampaknya terhadap individu dan umat) karangan Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hady Al-Madkhaly. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ideologi sebagai seperangkat kepercayaan yan g berada dalam diri dan pemikiran seseorang menjadi penggerak tindakan dalam merespon fenomena di sekitarnya. Kekuatan ideology untuk memanggil individu pengikutnya menggambarkan sebuah proses ketundukan alamiah yang berasal dari kesadaran individu. Kemampuan ideologi untuk menundukkan seseorang melebihi kemampuan senjata da represi kekuasaan. Ideologi bergerak dengan halus dan menggerakkan manusia dengan kesadaran yang leih kuat dari tekanan fisik. Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, dalam Storey (ed.), hal. 151-162 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sumber: Concepts of Terorism, *Analysis of the rise, decline, trends and risk,*  2008, COT Institute, Netherland hal: 19 [↑](#footnote-ref-15)
15. Althusser merupakan salah satu tokoh yang menolak esensi Marx, yaitu tentang ‘economism’ dan ‘humanism’. Althusser mengatakan bahwa ideologi merupakan representasi dari hubungan imaginer antara individu dengan kondisi eksistensi nyatanya. Kedua mengatakan bahwa representasi gagasan yang membentuk ideologi tersebut tidak hanya mempunyai eksistensi spriritual, tetapi juga material. Eksistensi material menurut Althusser dapat dikatakan merupakan kepercayaan seseorang atau ideologi seseorang terhadap hal tertentu yang akan diturunkan dalam bentuk-bentuk material yang secara alami akan diikuti oleh orang tersebut.Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, dalam Storey (ed.), hal. 151-162. [↑](#footnote-ref-16)
16. Pemanfaatan secara aktif berarti teroris secara sadar berupaya melakukan aksi yang mendapat perhatian media sehingga efek perbuatan mereka diketahui masyarakat. Semakin besar perhatian public terhadap aksi mereka munjukkan bagaimana para teroris berhasil menjadi agenda pemberitaan media. Baca artikel berjudul "Without Media There Can Be No Terrorism!" karya Effendi Gazali Staf Pengajar Program Pascasarjana Komunikasi UI Sumber: Kompas Cyber Media [↑](#footnote-ref-17)
17. Manuel R. Torres Soriano, “Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?”, Athena Intelligence JournalVol. 3, No 1, (2008), pp. 1-20. [↑](#footnote-ref-18)
18. Idem. Gaining attention is strongly linked to agenda setting. Terrorists are trying to be in the media as often and as long as possible, in order to become well known to the public [↑](#footnote-ref-19)
19. Terrorism and The Media, 2008, COT Institute, Netherland hal: 3. Model serangan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme seperti Macan Tamil dan serangan di Irak, Afghanistan dan Philipina memiliki pesan politik seperti kemerdekaan suatu wilayah maupun ketidaksetujuan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dalam agenda setting teroris memposisikan dirinya sebagai salah satu materi penting dalam agenda pemberitaan media. Kerangka framing merujuk pada bagaimana media membingkai tindakan teroris sehingga motif mereka bisa dipahami oleh audiens. Terrorism and The Media, 2008, COT Institute, Netherland, hal:9-10. [↑](#footnote-ref-21)
21. Baca artikel berjudul "Without Media There Can Be No Terrorism!" karya Effendi Gazali Staf Pengajar Program Pascasarjana Komunikasi UI Sumber: Kompas Cyber Media [↑](#footnote-ref-22)
22. Dalam kerja jurnalistik selain aspek factual dan actual, aspek kecepatan dalam menyajikan berita serta seberapa besar daya tarik kasus yang diberitakan menjadi nilai berita tersendiri. Terrorism and The Media, 2008, COT Institute, Netherland Hal 16-17 [↑](#footnote-ref-23)
23. Berikut pernyataan seorang wartawan Kompas ketika menanggapi tentang maraknya pemberitaan terorisme di media tersebut: “ini adalah soal magnitude,,terorisme adalah isu nasional yang laku di jual.” [↑](#footnote-ref-24)
24. Terrorism and Mass Media, Communications Research Trends, Volume 21 (2002) No 1 hal: 24-42 [↑](#footnote-ref-25)
25. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "Anti Teror Act". Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti Terror Act), yang jika dilafalkan dalam [bahasa Inggris](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris) berbunyi *Ei Ti Ekt*. Pelafalan ini kedengaran seperti Eighty Eight (88). Jadi arti angka 88 bukan seperti yang selama ini beredar bahwa 88 adalah representasi dari jumlah korban bom bali terbanyak (88 orang dari Australia), juga bukan pula representasi dari [borgo](http://id.wikipedia.org/wiki/Borgol)l [↑](#footnote-ref-26)
26. Prestasi penanganan terorisme di Indonesia tidak hanya pada aspek *counter terrorism* tetapi juga mampu melibatkan peran serta berbagai pihak untuk berdialog dengan para pelaku terror. Karnavian, M. Tito, 2008, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso***,** Gramedia Pustaka Utama : Jakarta [↑](#footnote-ref-27)
27. Definisi tersebut bisa jadi tidak berasal dari Kompas secara langsung, namun dalam proses pemberitaan yang melibatkan hirarki peliputan keniscayaan tersebut akan terbentuk. Pengutipan narasumber, pemilihan dan penyusunan fakta, dan penempatan berita menjadi bagian tak terpisahkan dari proses terbentuknya definisi tersebut. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ketika isu terorisme memiliki magnitude pemberitaan yang kuat maka dengan sendirinya peristiwa tersebut membuat media secara regular menempatkannya dalam pemberitaan. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut membentuk Kompas menjadi media yang banyak merepresentasikan isu terorisme. Magnitude yang kuat dari berita terorisme menempatkannya dalam posisi daya tarik pemberitaan. [↑](#footnote-ref-29)
29. Mcnair,1995:172, Dikutip dari artikel Fajar Junaedi, *Relasi Terorisme dan Media,* dimuat di Jurnal Aspikom/Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Edisi 1/Vol. 1 Juni 2010 [↑](#footnote-ref-30)
30. Gagasan yang bercorak Foucauldian ini merujuk pada Sara Mills, *Discourse* (London dan New York: Routledge, 1997), hal. 48-49. [↑](#footnote-ref-31)
31. Dalam setiap penggrebegan dan penangkapan teroris para anggota Densus 88 aksi terror tidak pernah dinampakkan secara terang-terangan wajahnya. Dengan tutup topeng dan baju yang menutup seluruh tubuh polisi harus disembunyikan berkaitan dengan keamanan mereka sendiri. Sementara pelaku terror akan ditampakkan secara jelas kepada media. Dalam sebuah wawancara dengan TV One, mantan Kepala Densus 88 Brigjen Suryadarma Ali, mengungkapkan bahwa maksud penggunaan pakaian anggota Densus yang menutup wajah adalah agar keamanan mereka dan keluarganya terjamin dari kemungkinan aksi balas dendam para teroris. [↑](#footnote-ref-32)
32. Lihat Sonja K. Foss, Karen A. Foss dan Roberts Trapp, *Contemporary Perspectives on Rhetoric* (Illinois: Waveland Press, 1985), hal. 195-198. Uraian lengkap bisa dibaca di Tesis Triyono Lukmantoro, berjudul “Tabloidisasi Pemberitaan: Studi Pada Koran Meteor”, Universitas Gajah Mada. [↑](#footnote-ref-33)
33. Penulis melakukan wawancara dengan wartawan Kompas terkait posisi polisi sebagai nara sumber utama. Berikut petikannya: penulis: apakah anda menjadikan narasumber resmi seperti kepolisian, kejaksaan dan pemerintah sebagai rujukan utama pemberitaan terorisme?. Jawaban wartawan kompas: dalam kajian jurnalistik, harus selalu dicari narasumber yang paling berkompeten untuk menerangkan suatu topik yang spesifik. Misalnya, korban aksis teror, tanya polisi. Kronologis teror, tanya masyarakat / saksi mata. Jika sudah menyangkut skala nasional dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas nasional, maka tanya pemerintah. Tapi untuk penyeimbang, harus ada klarifikasi dari pihak-pihak atau setidaknya kelompok yang dikaitkan dengan aksi teror tersebut. [↑](#footnote-ref-34)
34. Shoemaker Pamela dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media: 2nd edition* (New York: Longman, 1996). hal. 90-91. [↑](#footnote-ref-35)
35. Hasil wawancara penulis dengan wartawan Kompas menunjukkan bagaimana kognisi social memegang peran penting dalam memandang kegiatan terorisme. Sebuah jawaban menarik diberikan ketika pertanyaan: Apa terorisme murni masalah ideologi, kelompok, atau politis?. Sebagian jurnalis menjawab: bahwa terorisme memang terkait dengan ideology kelompok tertentu sedangkan sebagian wartawan lain menyebut aksi terorisme merupakan campuran ketiga kutub falsafah itu. Misalnya, sebuah niat politik yang dilakukan dengan memanfaatkan ideologi kelompok tertentu yang diketahui mampu menimbulkan keresahan masyarakat yang pasti berdampak pada suhu politik. [↑](#footnote-ref-36)
36. Erving Goffman menyebutkan dua tipe orang yang terstigmatisasi yaitu *the discredited and discreditable*. The discredited adalah orang yang nampak berbeda dengan tataran ideal orang pada umumnya. Sebagai contoh idealnya seseorang tidak memiliki penyimpangan seksual baik gay atau lesbian. Ketika seseorang diketahui penyimpangannya oleh orang lain maka ia disebut *discredited.* Sedangkan *the discreditable* adalah orang yang berbeda atau menyimpang dari norma ideal namun perbedaan atau penyimpangannya belum diketahui orang lain. Ketika penyimpangannya diketahui oleh orang lain maka ia akan ditolak dari pergaulan. Silahkan dilihat “Parsons’ sick role” karya Kath Maguire, versi pdf bisa dilihat di *www.medgraphics.cam.ac.uk/shield/* [↑](#footnote-ref-37)
37. Lihat F. Budi Hardiman, “Takut Akan Yang Lain: Catatan-catatan tentang Heterofobia”, dalam J.B. Kristanto, Bre Redana, dan Nirwan A. Arsuka (eds.), *Esei-Esei Bentara* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hal. 101. [↑](#footnote-ref-38)